

Nama : Nazwa Devita Mawarni
NPM : 2313031071
Kelas : 2023 C
Mata Kuliah : Ekonomi Pendidikan

SOAL KASUS

“Reformasi Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Nusantara Raya”

Pemerintah Provinsi *Nusantara Raya* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Jumlah penduduk: 8 juta jiwa
- Anggaran pendidikan: 22% dari APBD
- 68% anggaran pendidikan digunakan untuk gaji dan tunjangan guru
- 12% untuk infrastruktur
- 8% untuk program bantuan siswa (beasiswa & subsidi)
- 12% untuk administrasi dan lainnya

Namun, hasil evaluasi menunjukkan:

- Skor literasi dan numerasi siswa berada di bawah rata-rata nasional
- Ketimpangan kualitas antara sekolah kota dan desa sangat tinggi
- Banyak sekolah memiliki guru berlebih di kota, tetapi kekurangan guru di daerah terpencil
- Infrastruktur digital sangat terbatas

Sebagai pembanding, pemerintah pusat ingin mendorong reformasi dengan merujuk praktik negara anggota OECD yang:

- Memiliki sistem *performance-based budgeting*
- Mengalokasikan dana berbasis kebutuhan siswa
- Mengutamakan peningkatan kualitas guru
- Menggunakan sistem evaluasi berbasis data

TUGAS ANDA

Sebagai analis ekonomi pendidikan, Anda diminta menyusun rekomendasi kebijakan dengan menjawab pertanyaan berikut:

1) Analisis Struktur Pengeluaran

- Apakah struktur belanja pendidikan di Nusantara Raya sudah efisien?

Jawab:

Struktur belanja pendidikan di Provinsi Nusantara Raya belum efisien karena mayoritas dana (68%) terserap untuk gaji dan tunjangan guru, padahal evaluasi menunjukkan masalah utama justru ketimpangan distribusi guru, skor literasi-numerasi rendah, dan infrastruktur digital minim, artinya uang banyak tetapi hasil belajar siswa tidak membaik secara signifikan. Dominasi alokasi gaji ini mencerminkan pola umum di daerah Indonesia, di mana pemerintah daerah rata-rata menghabiskan 75% anggaran pendidikan untuk gaji, menyisakan sedikit ruang untuk program yang berdampak langsung seperti pelatihan guru atau fasilitas.

- Bagian mana yang perlu direalokasi? Mengapa?

Jawab:

Realokasi diperlukan dengan mengurangi porsi gaji dan tunjangan guru berlebih di wilayah perkotaan sebesar 5-10%, yang kemudian dialihkan ke program bantuan siswa (dinaikkan dari 8% menjadi 15%) untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus di daerah terpencil, serta infrastruktur digital (dinaikkan dari 12% menjadi 18%) guna mengurangi disparitas antar wilayah. Alasan utamanya adalah keselarasan dengan praktik negara OECD yang menganut *performance-based budgeting*, di mana dana lebih berorientasi pada kebutuhan siswa dan peningkatan kualitas guru melalui evaluasi berbasis data, sehingga anggaran menjadi lebih efektif dalam menghasilkan *outcome* pendidikan yang optimal. Selain itu, alokasi administrasi (12%) dapat dipangkas 2-3% untuk efisiensi birokrasi, dengan dana tersebut dialokasikan kembali ke prioritas strategis.

2) Analisis Sumber Pembiayaan

- Apakah pembiayaan masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah?

Jawab:

Pembiayaan pendidikan di Provinsi Nusantara Raya masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah melalui APBD, mengingat alokasi 22% dari APBD sebagai sumber

utama tanpa indikasi signifikan dari sumber alternatif lain. Ketergantungan ini rentan terhadap fluktuasi fiskal daerah dan membatasi inovasi, sebagaimana terlihat pada tantangan efisiensi struktur pengeluaran yang telah dianalisis sebelumnya.

- Perlukah melibatkan sektor swasta atau skema pembiayaan alternatif? Jelaskan model yang tepat.

Jawab:

Menurut saya, dalam hal ini perlu melibatkan sektor swasta dan skema pembiayaan alternatif untuk diversifikasi sumber dana serta peningkatan efektivitas, sesuai arahan reformasi pemerintah pusat yang merujuk praktik OECD. Model yang tepat adalah Kemitraan Pemerintah Swasta (*Public-Private Partnership/PPP*), di mana swasta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur digital, program beasiswa berbasis kebutuhan siswa, dan pelatihan guru melalui kontrak berbasis kinerja, model ini telah terbukti optimal di Indonesia untuk sinergi sumber daya dan keahlian swasta. Selain itu, skema *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *crowdfunding* dapat diterapkan untuk bantuan siswa di daerah terpencil, dengan regulasi jelas untuk memastikan akuntabilitas dan keselarasan dengan *performance-based budgeting*. Pendekatan ini akan mengurangi beban APBD sembari menargetkan ketimpangan kualitas pendidikan secara tepat sasaran.

3) Perbandingan dengan Negara OECD

- Elemen apa dari praktik negara OECD yang realistis diadopsi?

Jawab:

Elemen praktik negara OECD yang realistis untuk diadopsi di Provinsi Nusantara Raya mencakup sistem *performance-based budgeting* untuk mengalokasikan dana berdasarkan kinerja dan kebutuhan siswa, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan profesional berbasis data, serta evaluasi berbasis data guna mengukur *outcome* literasi-numerasi dan mengatasi ketimpangan. Praktik-praktik ini telah terbukti efektif di negara-negara OECD seperti Finlandia dan Singapura, serta selaras dengan reformasi pendidikan nasional di Indonesia yang menekankan kurikulum fleksibel dan platform digital untuk pengambilan keputusan berbasis data

- Apa tantangan implementasinya di konteks Indonesia?

Jawab:

Tantangan implementasinya di konteks Indonesia meliputi dominasi standar biaya input daripada output pada *performance-based budgeting*, keterbatasan transparansi data anggaran, serta lemahnya akuntabilitas kinerja yang menyebabkan implementasi belum optimal. Selain itu, disparitas regional, kurangnya pelatihan guru digital, resistensi perubahan birokrasi, dan kebutuhan pengembangan kapasitas SDM menjadi hambatan utama, terutama di daerah terpencil dengan akses internet terbatas. Untuk mengatasinya, diperlukan penyesuaian regulasi nasional-daerah, investasi sistem data terintegrasi, serta komitmen politik berkelanjutan.

4) Rancangan Reformasi

Susun proposal singkat reformasi pembiayaan pendidikan selama 5 tahun yang mencakup:

- Perubahan struktur belanja
- Strategi peningkatan kualitas guru
- Digitalisasi sekolah
- Mekanisme monitoring dan evaluasi

Jawab:

Proposal Reformasi Pembiayaan Pendidikan Provinsi Nusantara Raya (2026-2031)

Proposal ini berisi rencana perubahan sistem pendanaan pendidikan selama lima tahun. Tujuannya adalah mengatasi pemborosan anggaran, kesenjangan kualitas pendidikan, serta keterbatasan fasilitas sekolah. Target akhirnya adalah meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa hingga 20% di atas rata-rata nasional pada tahun 2031.

Perubahan Struktur Belanja

Anggaran pendidikan sebesar 22% dari APBD akan dialihkan secara bertahap. Pada tahun pertama, porsi gaji dan tunjangan guru diturunkan dari 68% menjadi 60% dengan mengurangi kelebihan guru di daerah perkotaan. Sementara itu, bantuan untuk siswa meningkat dari 8% menjadi 12% dengan fokus pada daerah terpencil. Anggaran infrastruktur digital naik dari 12% menjadi 16%, dan biaya administrasi dikurangi dari 12% menjadi 10%.

Pada tahun kelima, komposisi anggaran ditargetkan menjadi 55% untuk gaji, 15% bantuan siswa, 20% infrastruktur, dan 10% kebutuhan lainnya. Selain itu, akan diterapkan sistem penganggaran berbasis kinerja yang mengaitkan alokasi dana dengan hasil belajar siswa.

Strategi Peningkatan Kualitas Guru

Sebanyak 50% guru akan mengikuti pelatihan, terutama guru di daerah terpencil, melalui program sertifikasi berbasis data. Guru juga akan mendapatkan insentif kinerja sebesar 10% dari tunjangan mereka. Akan dilakukan rotasi guru antara kota dan desa yang melibatkan 20% tenaga pendidik, serta kerja sama dengan sektor swasta untuk pelatihan digital.

Setiap tahun disiapkan anggaran Rp500 miliar untuk merekrut 5.000 guru berkualitas di daerah yang kekurangan tenaga pengajar, dengan evaluasi tahunan melalui platform data nasional.

Digitalisasi Sekolah

Pemerintah akan menginvestasikan Rp1 triliun secara bertahap untuk menyediakan internet cepat di 80% sekolah, mengembangkan platform *e-learning* terpadu, serta menyediakan perangkat belajar bagi siswa di desa. Kerja sama dengan pihak swasta melalui program CSR akan dilakukan untuk membuat konten pembelajaran yang lebih adaptif. Targetnya, pada tahun keempat seluruh sekolah desa sudah terdigitalisasi agar kesenjangan akses pendidikan dapat berkurang melalui pembelajaran campuran (*blended learning*).

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Akan dibuat *dashboard* data terpusat berbasis AI untuk memantau secara langsung berbagai indikator, seperti hasil tes mirip PISA, penggunaan anggaran, serta kepuasan siswa dan guru. Evaluasi tahunan dilakukan oleh tim independen, dan sekolah dengan kinerja rendah dapat dikenai sanksi atau pengurangan anggaran. Laporan akan dipublikasikan setiap tiga bulan dan diaudit secara berkala agar penggunaan dana tetap transparan dan dapat disesuaikan setiap tahun sesuai kebutuhan.

.